CASCADING DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

MISI RPJMD	MISI 4 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERORIENTASI PADA PERAN KEPEMUDAAN, KEBUDAYAAN DAN HARMONISASI SOSIAL		
TUJUAN RPJMD	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Indikator : Indeks Kesalehan Sosial		
SASARAN RPJMD	MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT Indikator : PDRB Perkapita		
TUJUAN DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN, MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KOPERASI DAN PERAN USAHA MIKRO DALAM PEREKONOMIAN		
	Indikator 1 : Prosentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Indikator 2 : Prosentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	Indikator 3 : Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
SASARAN DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS Indikator : Prosentase Koperasi yang Berkualitas	MENINGKATNYA USAAHA MIKRO MMENJADI WIRAUSAHA Indikator : Prosentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA Indikator : Persentase Penyerapan Tenaga Kerja
PROGRAM DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UASAHA MIKRO	KEPALA BIDANG KOPERASI 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	KEPALA BIDANG USAHA MIKRO 1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program PENGEMBANGAN UMKM CROSSCUTTING : MISI 3 AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL	KEPALA BIDANG TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial

KEGIATAN, SUB KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UASAHA MIKRO	**1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** **a. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota** 1. FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI 2. PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 3. PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA 4. PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	**1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** **a. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro** **b. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan** 1. FUNGSIONAL PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA 2. PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 3. PENGADMINISTRASI UMUM	**1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)** **a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro** 1. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 2. PENGANTAR KERJA AHLI MUDA 3. MEDIATOR AHLI MUDA 4.PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 5. PERENCANA AHLI PERTAMA 5.PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA
	2. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota** 1. FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI 2. PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 3. PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA 4. PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	**2. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** **a. Pengembangan Usaha Mikro** **b. Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro** 1. FUNGSIONAL PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA 2. PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 3. PENGADMINISTRASI UMUM	**2. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** **a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi** 1. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 2. PENGANTAR KERJA AHLI MUDA 3. MEDIATOR AHLI MUDA 4.PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 5. PERENCANA AHLI PERTAMA 5.PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA
	3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota **a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi** 1. FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI 2. PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 3. PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA 4. PENGOLAH DATA DAN INFORMASI		**3. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** **a. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja** **b. Perluasan Kesempatan Kerja** 1. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 2. PENGANTAR KERJA AHLI MUDA 3. MEDIATOR AHLI MUDA 4.PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 5. PERENCANA AHLI PERTAMA 5.PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA
	4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota **a. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha** **b. Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota** 1. FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI 2. PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 3. PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA 4. PENGOLAH DATA DAN INFORMASI		**4. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** **a. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online** **b. Job Fair/Bursa Kerja** 1. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 2. PENGANTAR KERJA AHLI MUDA 3. MEDIATOR AHLI MUDA 4.PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 5. PERENCANA AHLI PERTAMA 5.PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA
			5. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan** 1. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 2. PENGANTAR KERJA AHLI MUDA 3. MEDIATOR AHLI MUDA 4.PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 5. PERENCANA AHLI PERTAMA 5.PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA
			6. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota **a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** **b. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja** 1. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 2. PENGANTAR KERJA AHLI MUDA 3. MEDIATOR AHLI MUDA 4.PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 5. PERENCANA AHLI PERTAMA 5.PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA